

Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Marlina

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstract

The treatment of foreigners in a country associated with the study of the state's responsibility in protecting its citizens abroad. It is highly influenced in equilibrium between two fundamental rights which are owned by a country. State has the right to exercise jurisdiction within its own territory, free from supervision by other states. On the other hand, the state has the right to protect its citizens abroad. These rights include the implementation aspects of jurisdiction under the authority of the state and aspects of the right to protect its citizens abroad. These fundamental rights and obligations are always strived for the realization of the concept of "good-neighbourlines" nor the concept of "peaceful co-existence". It is not easy to make it happen because it will always comes up different interests which are always aligned with international law. Thus the role of the state in the formation of international law as well as in influencing the implementation of international law is inevitable. Study of Legal Protection of the Rights of Migrant Workers by the State in its Capacity as Subject of International Law has implications on how the state's role in the formation of international law governing the protection of the rights of migrant workers, who are in this case individual, as well as how the implementation of international law be enforced, while maintaining the same goal in the realization of the concept of good and peaceful coexistence. Two studies will explore the level of the legal establishment that aims to protect and the law enforcement in the implementation level.

Kata Kunci : the rights of migrant workers; legal protection and law enforcement

Abstrak

Perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri berkoneksi terhadap kajian tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat dipengaruhi pada terkondisikannya keseimbangan antara dua hak fundamental yang dimiliki oleh negara. Di satu pihak negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain. Di pihak yang lain, negara memiliki hak untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Termuat aspek pelaksanaan yurisdiksi yang menjadi kewenangan negara dan aspek hak untuk melindungi warga negaranya di luar negeri. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental tersebut selalu diupayakan untuk terwujudnya konsep “good-neighbourlines” maupun konsep “peaceful co-existence”. Tidak menjadi mudah karena akan selalu muncul perbedaan kepentingan yang selalu diselaraskan dengan hukum internasional. Dengan demikian peranan negara dalam pembentukan hukum internasional maupun dalam mempengaruhi implementasi hukum internasional merupakan hal yang tidak

dapat dihindarkan. Kajian hukum perlindungan hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional membawa implikasi bagaimana peran negara dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang dalam hal ini individu sekaligus bagaimana implementasi hukum internasional ditegakkan, dengan tetap mempertahankan tujuan yang sama dalam terwujudnya konsep hidup bertetangga yang baik dan hidup berdampingan secara damai. Dua kajian yang mengupas tataran pembentukan hukum yang bertujuan melindungi dan tataran penegakkan dalam pelaksanaan.

Kata Kunci : hak buruh migran; perlindungan dan penegakkannya

Pendahuluan

Negara sebagai subyek utama hukum internasional terbentuk dari unsur-unsur konstitutif : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kedaulatan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur dimaksud negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban mana yang pastinya terkait dengan keberadaan perlindungan penduduk, wilayah maupun pelaksanaan kedaulatan.

Penduduk merupakan unsur pokok dalam pembentukan suatu negara. Suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Menjadi permasalahan saat penduduk berada di wilayah negara lain dan tidak mendapat perlindungan hak-haknya. Dari dimensi negara sebagai subyek hukum internasional termuat makna negara tunduk pada ketentuan yang diatur dalam hukum internasional. Pengaturan yang meliputi hak dan kewajiban melekat pada subyek hukum dimaksud. Manakala yang selanjutnya terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu yang notabene merupakan unsur pokok dari suatu negara maka bagaimana peran negara untuk turut melengkapi ketentuan hukum internasional dalam tujuan memberikan perlindungan. Tidak terhenti pada tataran pembentukan namun juga secara terstruktur menjamin pelaksanaan dari ketentuan yang dibentuk. Tidak menjadi mudah karena negara dengan kedaulatannya masing-masing memiliki kebebasan dan persamaan antarnegara. Konsekuensi kedaulatan tersebut, salah satu kewajiban hukum setiap negara adalah menuntut siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran mana yang masuk wilayah tanggung jawab negara secara internasional (*internationally wrongful act*). Karenanya, siapa saja baik warga negara maupun orang asing wajib dilindungi. Dasar hukum kewajiban memberi perlindungan tersebut adalah atas dasar perjanjian antar negara, hukum perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum hukum internasional yang diakui disamping hukum nasionalnya masing-masing negara. (Masyhur, E. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia. Ghalia Indonesia, Bogor)

J.G.Starke menguraikan bahwa sumber-sumber materiil hukum internasional dapat dirumuskan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli hukum internasional dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu.